



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF POERBOYO MOEKIYAT**

Jabatan : **Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WIRANTO**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

WIRANTO

Pihak Pertama,

ARIEF POERBOYO MOEKIYAT

Unit Organisasi Eselon I

: **Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa**

Tahun Anggaran

: **2019**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang kesatuan bangsa.	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah Provinsi yang melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.2. Jumlah K/L yang melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa yang dikendalikan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan.3. Indeks Kerukunan Umat Beragama.4. Jumlah K/L yang dikoordinasikan Tim Harmonisasi Sosial.5. Jumlah K/L yang dikoordinasikan Tim Kewaspadaan Dini.6. Jumlah K/L yang dikoordinasikan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara.	33 Prov 17 K/L 72,5 10 K/L 10 K/L 13 K/L
Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas.	Nilai akuntabilitas kinerja.	BB (78)

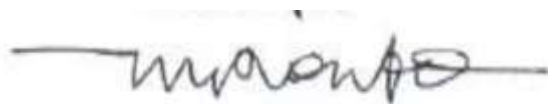
Jumlah Anggaran Program:

Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa:

Rp. 17.781.500.000,- (*Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Jakarta, Januari 2019

Menko Polhukam,



WIRANTO

**Deputi VI Bidang Koordinasi
Kesatuan Bangsa,**



ARIEF POERBOYO MOEKIYAT